

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan
Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Index Pembangunan Manusia (Ipm)
Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening**

(Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh BPS. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 190 dari daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan analisis jalur dan uji sobel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, secara langsung tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Khusus secara langsung berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan secara positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara tidak langsung berpengaruh signifikan secara positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening. Dana Alokasi Khusus secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi*

Pendahuluan

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri. kewenangan ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan yang merata disetiap daerah. Kebijakan ini tertuang dalam UU 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah baik dari pembangunan sektor publik maupun dari kualitas sumber daya manusia.¹

Pada UU No 32 tahun 2004 itu disebutkan bahwa salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah berasal Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan penerimaan lain berasal dari dana perimbangan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dimana dana perimbangan ini terbagi kepada 2 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk menghindari ketimpangan pembangunan daerah khususnya daerah tertinggal, Sedangkan Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk pembangunan khusus bagi daerah berpotensi dalam pembangunan sektor publik. Dan yang menjadi tujuan utama dana alokasi umum dan dana alokasi khusus adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengembangkan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan ekonomi.

¹ Andi Hamsiah dan Amir , *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2019), Hal.79

Dalam ekonomi Islam dijelaskan negara ataupun pemerintah baik pusat ataupun daerah sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena pemerintah bertanggung jawab terhadap warga atau masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tergantung bagaimana pemerintah dalam mengelola perekonomian daerahnya.

Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kualitas Sumberdaya manusia tergantung pada sarana dan prasarana serta kemampuan atau skill dari sumberdaya manusia itu sendiri.

Cadila, Petkovova, & Blatna menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia. Dan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui PDRB suatu daerah. Menurut Melliana & Zain melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan indeks kualitas sumber daya manusia dengan penemuan yakni faktor pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pembangunan yang terencana seperti anggaran untuk pendidikan, dengan peningkatan angka partisipasi sekolah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan ini diperlukan pembangunan kualitas manusia yang tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila Index pembangunan manusia meningkat maka akan semakin sejahtera pula penduduknya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan

masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan pendapatan perkapita rill.²

Dengan adanya standar ukuran dengan Index Pembangunan Manusia yang dihitung dari indikator standar hidup layak, pengetahuan dan umur panjang. Dimana hal ini akan dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang bertujuan untuk pembangunan kualitas manusia di suatu daerah.

Data Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat periode 2011-2020

TAHUN	IPM	PAD	DAU	DAK	PDRB	PE
2011	67,25	1.006.820.947.269	662.403.385.000	14.415.375.000	105.017.739.450	5,87
2012	67,81	1.147.303.770.000	764.680.895.000	40.733.300.000	111.679.492.970	6,14
2013	68,36	1.225.466.022.712	918.560.365.000	32.500.720.000	118.724.424.670	6,35
2014	68,91	1.366.178.102.000	1.039.922.511.000	63.941.975.000	125.874.696.150	6,33
2015	69,36	1.729.222.284.040	1.129.886.306.000	54.108.200.000	133.340.836.440	5,88
2016	69,98	1.876.733.122.800	1.221.128.606.000	62.731.100.000	140.719.474.190	5,53
2017	70,73	1.964.148.975.800	1.261.915.864.000	1.180.338.806.000	148.134.243.890	5,27
2018	71,24	2.134.010.519.500	2.014.646.639.000	1.699.580.667.860	155.984.364.130	5,30
2019	71,73	2.275.090.068.590	2.014.646.639.000	1.784.401.030.480	164.033.655.470	5,16
2020	72,39	2.328.432.873.690	2.076.398.191.000	1.844.831.704.010	172.320.500.990	5,05

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2022

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa tidak sejalan perkembangan PAD, DAU, DAK, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana tidak memperlihatkan hubungan yang positif. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Index Pembangunan Manusia (IPM), Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening”**

² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, 2022

Landasan Teori

1. Index Pembangunan Manusia

Index Pembangunan Manusia adalah index yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya. Index ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam bentuk *Human Development Report* (HDR) pada tahun 1990.

Paradigma pembangunan menurut UNDP adalah sebagai memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat pada proses sebagai upaya upaya perluasan pilihan dan sebagai taraf hidup yang dicapai dengan memperhatikan produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.³

Manfaat Index pembangunan manusia diantaranya adalah 1) merupakan indikator penting dalam mengukur dalam upaya peningkatan kualitas manusia 2) mentukan peringkat atau level pembangunan suatu

³ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 8

wilayah. 3) merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan sebagai alokator untuk pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).⁴

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

- a. Umur Panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran

Angka harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur *Longevity* (panjang umur). Panjang umur seseorang tidak hanya merupakan produk dari upaya yang bersangkutan melainkan juga seberapa jauh masyarakat atau negara dengan penggunaan sumber daya manusia yang tersedia berusaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Secara teori seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat dan bilaman mereka sakit dia harus mengatur untuk membantu mempercepat kesembuhannya sehingga dia dapat beratahan hidup lebih lama.⁵

Adapun indikator harapan hidup ini adalah:

- 1) Angka Kematian bayi
- 2) Penduduk yang diperkirakan mencapai usia 40 tahun
- 3) Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan

⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 10

⁵ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal.9

- 4) persentase penduduk yang sakit
 - 5) rata-rata sakit
 - 6) persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri
 - 7) persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis
 - 8) persentase baktita kekurangan gizi
 - 9) persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih
 - 10) persentase rumah tangga yang menghuni rumah yang berlantai tanah
 - 11) persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan
 - 12) persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi⁶
- b. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- Ada dua jenis indikator pendidikan pada hubungan pengetahuan dengan indeks pembangunan manusia
- 1) Angka melek huruf
 - 2) Rata-rata lama sekolah
 - 3) angka partisipasi sekolah
 - 4) angka putus sekolah “drop out/DO” dan lain-lain
- c. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan belanja) per kapita.

⁶ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal.11

Standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- 1) Jumlah yang bekerja
- 2) Jumlah pengangguran terbuka
- 3) Jumlah dan persentase penduduk miskin
- 4) PDRB rill per kapita⁷

Table 2.1

Perbedaan dalam perhitungan IPM sebelum 2010 dan setelah tahun 2010

Metode Lama (Sebelum 2010)		Metode Baru (Pasca 2010)	
Dimensi	Indikator	Dimensi	Indikator
Umur panjang dan hidup sehat	Angka Harapan Hidup	Umur panjang dan hidup sehat	Angka Harapan Hidup
Pendidikan dan pengetahuan	Angka Melek Huruf dan Rasio Kombinasi partisipasi kotor primer, sekunder, dan tersier	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah

⁷ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal.14

Standar Hidup layak	Produk Domestik Bruto	Standar Hidup layak	Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita
---------------------	-----------------------	---------------------	--

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

$IPM > 60$: IPM rendah artinya kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah tergolong rendah

$60 < IPM < 70$: IPM sedang artinya kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah tergolong sedang

$70 < IPM < 80$: IPM tinggi artinya kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah tergolong rendah

$IPM < 80$: IPM sangat tinggi artinya kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah tergolong rendah⁸

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD sebagai Sumber dana bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur dan sumber daya masyarakat daerah. Dana PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kek ayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan

⁸ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal. 16

dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing dengan sumber daya yang ada. Karena dengan meningkatnya PAD akan membantu pemerintah dalam menambah penerimaan pemerintah untuk realisasi belanja pemerintah melalui belanja langsung ataupun tidak langsung.⁹

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah diharapkan mampu membiaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang termasuk kedalam Pendapatan asli daerah provinsi adalah pajak Kendaraan bermotor diatas air (PKB-KAA) dengan tarif 5%, BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan KAA (Kendaraan diatas Air) dengan tariff 10%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tariff 5% dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tariff 20%.

b. Retribusi daerah

Sedangkan retribusi yang kepada PAD adalah Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan serta retribusi yang ditetapkan selain dengan peraturan pemerintah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

⁹ Dadang Suwanda dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 5

Hasil pengelolaan kekayaan pada BUMD seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit kecamatan pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pasanggrahan dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

d. Lain-lain PAD yang sah

PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi ataupun potongan ataupun bentuk lain atau jasa dari daerah.¹⁰

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diartikan sebagai dana yang dari APBN yang dialokasikan ke daerah demi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditentukan dari kecil besarnya fiscal gap daerah, dimana fiscal gap adalah selisih kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Menurut Walsh dan Thomson secara umum Dana Alokasi Umum dirancang untuk membantu daerah yang berpendapatan rendah ataupun

¹⁰ Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogayakarta: Graha Ilmu, 2016), hal. 120-121

tinggi biaya pelayanannya dengan pengrobanan daerah yang tinggi pendapatanya atau renda biaya pelayanannya.¹¹

Pemerintah daerah dapat bebas dalam menggunakan dana ini untuk meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan ditetapkan sekurang kurangnya 25% dari penerimaan dalam negri yang ditetapkan dalam APBN.¹²

4. Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.¹³

¹¹ Edi Sukamdi Hamid, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum*, (Yogyakarta: Uii orss), hal .40

¹² Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogayakarta: Graha Ilmu, 2016), hal. 124

¹³ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Menurut pasal 12 dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah terdapat 24 urusan wajib yang enam diantaranya adalah urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar, urusan tersebut meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,
- f. sosial¹⁴

5. Pertumbuhan Ekonomi

- a. Defenisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari perioride tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan.¹⁵ Sukirno mengatakan pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan tingkatan kegiatan ekonomi baru dari tahun ke tahun.¹⁶

¹⁴ Bambang Juanda dan Hefrizal Handra, *Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Kompak, 2017), hal.5

¹⁵ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), hal.41

¹⁶ Mudrajad Kuncoro dan Maria Cristina Yuli Pratiwi, *Membangun Kalimantan Potensi Ekonomi Daerah, Pusat Pertumbuhan dan Strategi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2017), hal.5

Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka waktu panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1) Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan pemabangunan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.

2) Sumber Daya Alam

c. Pertumbuhan Ekonomi Konvensional

Menurut Adam Smith perekonomian akan berkembang jika populasi penduduk mendukung perkembangan produktivitas tenaga kerja dan perkembangan teknologi.¹⁷

6. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli daerah adalah tulang punggung untuk pembiayaan daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan ekonomi diukur dari kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar PAD berkontribusi terhadap APBD maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dan juga dana yang dimiliki pemerintah daerah juga akan semakin tinggi sehingga pemerintah daerah

¹⁷ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal.34

berinisiatif untuk menggali potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tingkat kemandirian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari kemampuan PAD dalam menunjang pembangunan daerah tersebut. Jika Suatu daerah itu semakin mandiri maka semakin besar pendapatan asli daerah tersebut dalam membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Tujuan utama dari adanya penetapan perhitungan penerimaan pemerintah melalui pendapatan asli daerah adalah untuk membentuk kemandirian fiscal daerah sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.¹⁸

Dengan adanya PAD sebagai penunjang pembangunan daerah maka pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana di daerah tersebut semakin baik. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh infrastruktur dan sarana prasarana yang baik.

7. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam meningkatkan kesejateraan daerahnya. Dengan adanya perbedaan kemampuan ini menyebabkan ketimpangan fiscal pada suatu daerah. Untuk mengantisipasi ini maka pemerintah daerah mendapatkan uluran tangan dari pemerintah pusat berupa dana yang dinamai Dana Alokasi umum. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dana Alokasi umum

¹⁸ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2017), hal 9-10

adalah dana perimbangan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang bertujuan menyeimbangkan keuangan suatu daerah. Dimana DAU ini pengalokasianya mengutamakan keadilan dan pemerataan yang sejalan dengan kegiatan pemerintahan daerah tersebut.

Menurut Abdullah dan Hali bahwa dengan adanya transfer dana dari pusat ke daerah dari APBN yang cukup signifikan dapat membuat pemerintah daerah leluasa menggunakan dana untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau keperluan lain.

Musgrave menyebutkan bahwa pesatnya pembangunan daerah karena tersedianya dana bagi pembiayaan fiscal yaitu Alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar.

Pengalokasian DAU ini berhubungan dengan belanja langsung suatu daerah. Dimana Belanja langsung ini berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya DAU menutupi kekurangan pemerintah daerah dalam mencukupi belanja langsung suatu daerah ini dalam hal pelayanan kepada masyarakat maka akan dapat membantu daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.¹⁹

¹⁹ Abas, *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: CV Lontar Mediatama, 2018), hal.97

8. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus juga merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus berfungsi sebagai pelengkap dari dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya. Namun saat sekarang dana alokasi khusus sangat berperan penting dalam mempengaruhi pembangunan daerah yang berdampak juga kepada pembangunan nasional.

Dana Alokasi Khusus juga berfungsi sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan melalui pembiayaan pelayanan public yang bersifat khusus. Yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan pelayanan public suatu daerah dengan daerah lainnya. Dan secara tidak langsung pelayan public ini mempengaruhi pembangunan masyarakat suatu daerah yang dapat berdampak langsung kepada laju pertumbuhan ekonomi daerah.²⁰

9. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan pendanaan sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan pembangunan

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07/ 2006 Tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Pasal 5

ekonomi yang nantinya mampu menciptakan perguliran dana untuk kemajuan daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendanaan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Tentunya dengan adanya pendapatan asli daerah dalam peningkatan pembangunan fasilitas publik ini berhubungan dengan pembangunan manusia yang di daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli daerah dapat menyokong dalam pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang mana hal tersebut berhubungan dengan pengukuran dari indeks pembangunan manusia.²¹

10. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia

Penerapan desentralisasi fiskal tentunya memiliki konsekuensi-konsekuensi, dimana daerah dituntut mampu membiayai pengeluaran daerah menggunakan pendapatan asli daerah. Akan tetapi tidak semua daerah mampu membiayai belanja daerahnya. Hal ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata.

Karena terjadinya pembangunan yang tidak merata, pemerintah melakukan pengalokasian dari APBN yang dinamai dengan Dana Alokasi Umum sebagai penopang atau penyeimbang keuangan daerah yang memiliki kekurangan dalam mencukupi pengeluaran dalam

²¹ Carol J.Cielfe Colfer, *Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan Mencari Tata Kelola Yang Baik Dan Berkeadilan Di Asia Pasifik*, (Jakarta: Center For International Riset, 2009), hal.175

belanja pemerintah, sesuai yang tertera pada pasal 6 undang-undang 25 tahun 1999.

Membaiknya keuangan daerah dengan dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi umum, maka hal ini akan berkonstribusi terhadap kualitas kesejahteraan manusia yang dapat terukur dengan indeks pembangunan manusia. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan daerah maka semakin mampu daerah dalam membiayai dan memenuhi keperluan yang diharapkan masyarakat.²²

11. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dana alokasi khusus juga merupakan dana transfer dari APBN ke daerah yang digunakan untuk menjalakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. DAK dikhkususkan kepada daerah tertentu dan digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional.²³

Dalam PP no 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi khusus digunakan dalam investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan pra sarana fisik, pelayanan penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai adminitrasi kegiatan, penyiapan, kegiatan

²² Carol J.Cielfe Colfer, *Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan Mencari Tata Kelola Yang Baik Dan Berkeadilan Di Asia Pasifik*, (Jakarta: Center For International Riset, 2009), hal.177

²³ Carol J.Cielfe Colfer, *Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan Mencari Tata Kelola Yang Baik Dan Berkeadilan Di Asia Pasifik*, (Jakarta: Center For International Riset, 2009), hal.180-181

fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Hal ini menjelaskan bahwa acuan utama dari DAK adalah pembangunan fasilitas public seperti fasilitas pendidikan dalam rehabilitasi sekolah, sanitasi air bersih dan lain sebagainya. Dan tentunya hal ini berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia di daerah tertentu.

12. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat pada 2 arah, yaitu Pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan bersifat linear atau langsung namun ditentukan dengan faktor-faktor yang menghubungkan dua konsep tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi modern menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan ditentukan oleh tenaga kerja dan modal manusia. Penelitian pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Barro melihat pengaruh langsung modal manusia yang diwakili oleh pendidikan manusia dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB.

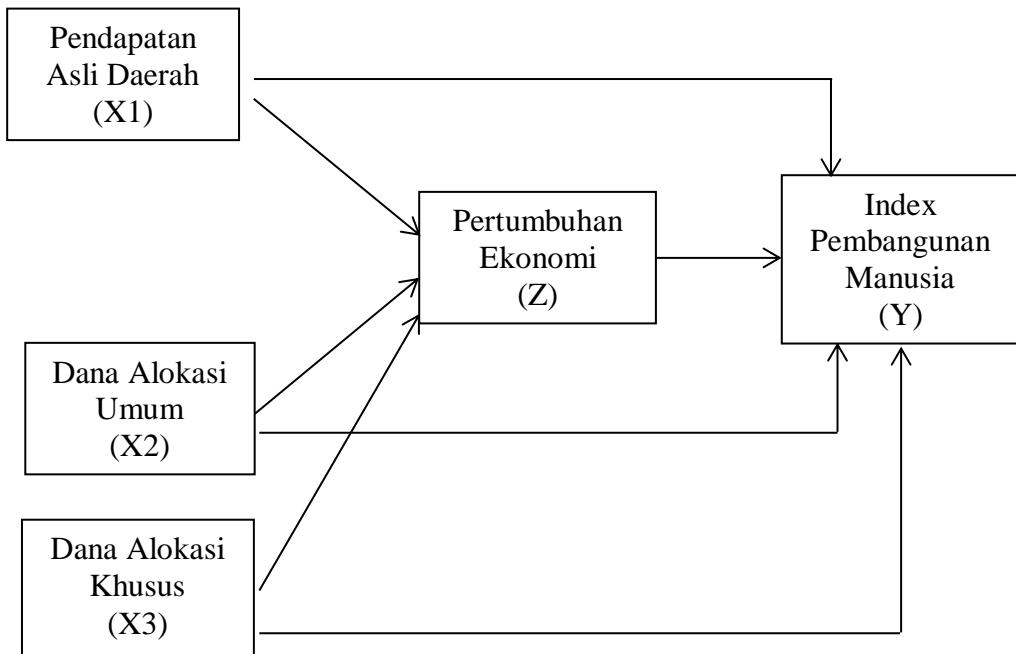
Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan manusia. Peningkatan Sumber daya manusia bersama dengan alokasi sumber daya manusia yang tepat dengan distribusi yang semakin luas. Tingkat pembangunan

manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.²⁴

Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori penjelasan diatas maka peneliti menggunakan variable independen (X1) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) , variabel independen (X2) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel independen (X3) Dana Alokasi Khusus sedangkan variabel dependennya (Y) yaitu Index Pembangunan Manusia dan variabel intervening (Z) yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini untuk mengatahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara langsung terhadap Index Pembangunan Manusia dan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

²⁴ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal. 35 -37



A. Hipotesis

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis atau jawaban sementara sebagai berikut:

- a. H_0 : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H_a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- b. H_0 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H_a : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- c. Ho : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Ha : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- d. Ho : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Ha : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- e. Ho : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Ha : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- f. Ho : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Ha : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- g. Ho : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Ha : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- h. Ho : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

Ha : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

i. Ho : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

Ha : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

j. Ho : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

Ha : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

Metodologi Penelitian

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Index Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening, maka digunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dapat melihat bagaimana pengaruh secara langsung Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Index Pembangunan Manusia dan pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, Yaitu Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat,

dan Kota Padang, Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah Sekumpulan objek atau individu yang dapat dipelajari dan mempunyai kualitas dan karakter kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data PAD, DAU, DAK,IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2019.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sekumpulan objek atau individu atau bagian dari populasi.²⁶ Adapun sampel dari penelitian ini adalah data per Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Index Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2019.

D. Jenis Data

Jenis data dapat dikategorikan kepada data kuantitatif, dan data kualitatif, data intern, data ekstern, data primer, data sekunder dan data individual. Sudjana mengatakan data kuantitaif adalah data yang berbentuk

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.80

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),hal.81

bilangan sedangkan data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari.

Sedangkan menurut sumbernya Sudjana membagi jenis data kepada dua, yaitu data ekstern dan data intern. data Intern adalah data yang dicatat atau diperoleh sendiri sedangkan data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar sipencatat.

Sekaran mengungkapkan jenis data berdasarkan cara memperoleh ada dua, yaitu data primer dimana data didapatkan melalui focus group, wawancara, atau pengisian kuesioner. Dan data sekunder data yng diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang dikategorikan sebagai data sekunder misal dalam pencatatan arsip perusahaan, publikasi pemerintah dan lain-lain.

Koetjaningrat mengungkapkan jenis data yang dinamakan dengan data pengalaman individu. Data pengalaman individu adalah bahan keterangan mengenai apa yang dialami individu-individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang menjadi objek penelitian yang dalam ilmu psikologi sering dinamakan sebagai personal dokumen.²⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan perusahaan, badan atau lembaga seperti BPS.

²⁷Zulganef, *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*, (Yogyakarta: Tajuk Entri Utama, 2018), Hal.158-159

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk Studi kepustakaan. Dengan mengumpulkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

F. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Independent

Variabel Independent Menurut Sekaran yang dimaksud dengan variabel bebas atau variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependent) secara positif maupun negatif. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dapat mempengaruhi Index Pembangunan Manusia.

b. Variabel Dependent

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent atau variabel bebas atau yang menjadi sebab akibat dari adanya variabel bebas.²⁸ Variabel dependent dari penelitian ini adalah Index Pembangunan Manusia.

c. Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen dapat juga diartikan variabel ini dapat

²⁸ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2016), hal.49

memperlemah dan memperkuat hubungan antar variabel, tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Adapun yang menjadi variable intervening dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian yang ditujukan untuk memahami arti dari setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Kriteria pengukuran secara operasional dari masing-masing variabel yaitu:

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional
1	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang berasal dari Pajak daerah dan retribusi daerah serta dari pendapatan lain-lain
2	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diartikan sebagai dana yang dari APBN yang dialokasikan ke daerah demi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3	Dana Alokasi Khusus	DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
4	Index Pembangunan Manusia	Index Pembangunan Manusia adalah index yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lain
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan

		kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksikan dalam
--	--	--

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah kuisioner yang diberikan kepada responden berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas data yaitu melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki untuk menguji normal tidaknya sebaran data yang akan dinalisis, dengan uji normalitas residual yaitu dengan menggunakan grafik dan Kolmogorov Smirnov. Jika tingkat signifikansi > 0.05 , maka data adalah normal. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plo, uji chi square, skewness dan kurtosis atau kolmogrov smirnov.²⁹

Dasar Pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni:

- 1) Jika signifikasnsi lebih besar dari $\alpha = 0.05$, maka data tersebut terdistibusi dengan normal
- 2) Jika signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.³⁰

²⁹ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 15

³⁰ Agus Tri Basuki, *Penggunaan SPSS dalam Statistik*, (Yogyakarta: Danisa Media, 2014), hal.43

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui melihat apakah ada korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$).

Pengujian Autokorelasi yang sering digunakan adalah uji Durbin Witson (uji D_w) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak jika d lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) H_0 diterima jika d terletak antara d_U atau di $(4-d_U)$ yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Hasil tidak pasti jika antara d_L dan d_U atau diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Run tes dengan hipotesis sebagai dasar pengambilan keputusan.

- 1) Apabila nilai $asmp.sig$ (2-tailed) kurang dari 5% atau 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti data residual terjadi secara tidak acak (sistematis).
- 2) Apabila nilai $asmp.sig$ (2-tailed) lebih dari 5% atau 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arti data residual terjadi secara random (acak).

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu

adanya hubungan linier antar variabel independent dalam model regresi atau ada tidaknya hubungan antara korelasi tinggi antara variabel-variabel bebas dalam regresi liniear berganda. Jika ada korelasi tinggi pada variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebasnya menjadi terganggu.

Alat statistic yang digunakan untuk menguji gangguan multikolonearitas adalah dengan Variance Inflaction Factor (VIF), koerlasi pearson, antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues dan condition index (CI).

Dasar pengambilan keputusan uji Multikolonearitas ada 2 cara, yakni:

1) Melihat Nilai Tolerance

- a) Jika nilai tolerance > 0.10 maka artinya tidak terjadi multikolonearitas terhadap data yang diuji.
- b) Jika nilai tolerance < 0.10 maka artinya terjadi multikolonearitas terhadap data yang diuji.

2) Melihat Nilai VIF (Variance Inflaction Factor)

- a) Jika nilai VIF < 0.10 maka artinya tidak terjadi multikolonearitas terhadap data yang diuji.
- b) Jika nilai VIF > 0.10 maka artinya terjadi multikolonearitas terhadap data yang diuji.³¹

d. Uji Heteroskedastisitas

³¹ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kaunitatif Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 120

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat ketidakseimbangan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji statistic yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji park atau Uji white.³²

Uji Heterokedastisitas dengan uji Glejser SPSS bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka hal itu disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $> \alpha = 0.005$, kesimpulannya tidak terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi $< \alpha = 0.005$, kesimpulannya terjadi heterokedastisitas.³³

2. Uji Jalur (Path)

Uji jalur digunakan untuk mengetahui apakah data mendukung teori, yang secara a-priori dihipotesiskan, yang mencakup kaitan struktural antar variable terukur. Analisis jalur dapat dipecah menjadi komponen structural dan nonstruktural yang didasarkan pada

³² Agus Tri Basuki, *Pengantar Ekonometrika*, (Yogyakarta, Danisa Media, 2016), hal. 60-65

³³ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kaunitatif Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 122-123

diagram jalur. Pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dalam analisis jalur dapat berupa pengaruh langsung maupun tak langsung (variable intervening).³⁴

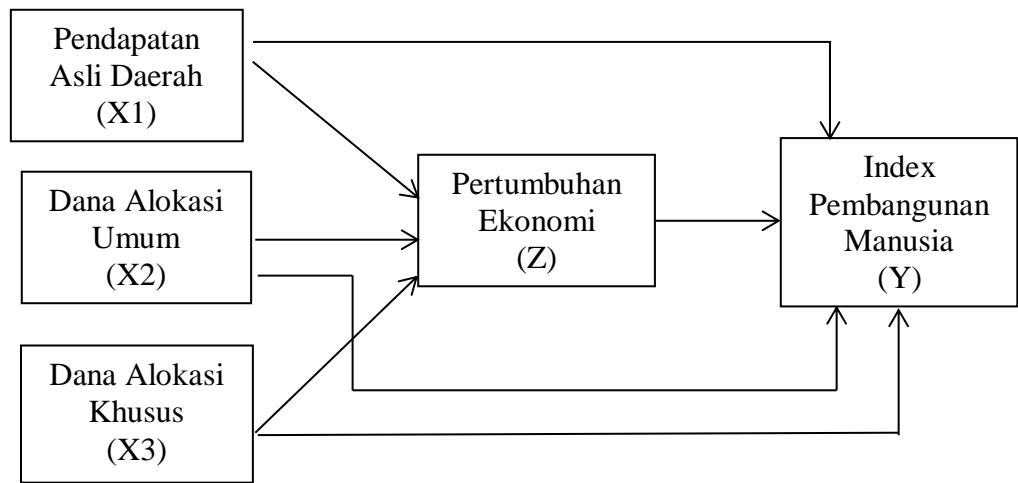
Langkah-langkah dalam analisis jalur :

a. Tahap I

menentukan diagram jalur berdasarkan paradigma hubungan variable

Diagram Jalur Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Index Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening.

Gambar 3.1



Menentukan persamaan structural

$$Z \text{ (Pertumbuhan Ekonomi)} = \beta_{PAD} + \beta_{DAU} + \beta_{DAK} + e_1$$

(Persamaan Struktural 1)

³⁴ M.Thoha B. Sampurna Jaya dan Alben Ambarita, *Statistik terapan dalam pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hal.158

$$Y (IPM) = \beta PAD + \beta DAU + \beta DAK + \text{Pertumbuhan}$$

$$\text{ekonomi} + e_1$$

(Persamaan Struktural 2)

c. Tahap III

Ada dua langkah yaitu analisis Substruktural 1 dan analisis substruktural 2

1) Analisis regresi Substruktural 1

$$Z (\text{Pertumbuhan Ekonomi}) = \beta PAD + \beta DAU + \beta DAK + e_1$$

1. Analisis regresi

Mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi . Adapun ketentuannya:

- jika signifikansi penelitian < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- jika signifikansi penelitian > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2) Analisis regresi Substruktural 2

$$Y (IPM) = \beta PAD + \beta DAU + \beta DAK + \text{Pertumbuhan Ekonomi}$$

$$+ e_1$$

Mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Adapun ketentuannya:

- jika signifikansi penelitian < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- jika signifikansi penelitian > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3. Uji Sobel (Sobel Test)

Uji sobel dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variable independen ke variable dependen melalui variable intervening. Dimana:

$$Sab = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 \cdot Sb^2}$$

keterangan :

Sa = standard error koefisien a

Sb = standard error koefisien b

b = koefisien variable mediasi

a = koefisien variable bebas

untuk melihat pengaruh tidak langsung maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t table, jika nilai t hitung $> t$ table maka dapat diambil kesimpulan terjadi pengaruh mediasi.³⁵ Uji

³⁵ Jonathan Sarwono, *Path Analisis Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis, Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS)*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2012), hal.79

sobel juga dapat dilakukan online dengan meninputkan data koefisien a, koefisien b, standard error a (SEa) dan Standar error b (SEb).³⁶

Pengambilan Uji hipotesis dengan uji sobel dilakukan dengan cara membandingkan p-value dan alpha (0,05) dengan ketentuan:

- Jika p-value < Alpha (0,05), Maka H0 ditolak artinya orientasi sebagai variable intervening
 - Jika p-value > alpha (0,05) maka H0 diterima artinya orientasi tidak sebagai variable intervening
- atau dengan melihat nilai z dengan ketentuan:
- Jika nilai z < 1,96 maka dinyatakan tidak mampu memediasi hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
 - Jika nilai z > 1,96 maka dinyakatakan mampu memediasi hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen³⁷

³⁶ Andrias Pong Wija dkk, *Employee Engangement Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Kerja, Dan Kepuasan Kerja*, (Klaten: Lakeisha, 2019), hal. 192

³⁷ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian dibidang Manajemen, Pendidikan, dan Eksperimen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 220

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Provinsi Sumatera Barat

a. Sejarah

Pada zaman colonial Belanda Sumatera Barat bernama *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC), dimana sampai abad 18 wilayah sumatera Barat mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Barus sampai Inderapura. Sejak runtuhan kerajaan Pagaruyung dengan keterlibatan Belanda pada perang Paderi, Belanda menjadikan Sumatera Barat sebagai wilayah dalam pengawasan Belanda

Pada masa penjajahan Jepang wilayah Sumatera berubah menjadi *Sumatora Nishi Kaigan Shu*. dengan geografis militer yang mengeluarkan daerah Kampar dan dimasukkan kedalam daerah wilayah *Rio Shu*.

Provinsi Sumatera Barat pada awal masa Kemerdekaan tergabung kedalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Kemudian setelah itu provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 provinsi menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera tengah dan Sumatera Selatan. Pada bagian provinsis Sumatera Tengah inilah Sumatera Barat, Riau dan Jambi sebagai pemecahan wilayah dibawah Sumatera

Tengah. Di dalam UU Darurat No 19 tahun 1957 disebutkan bahwa bagian Sumatera Tengah dipecah menjadi tiga provinsi yaitu provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi.

b. Keadaan Geografis

Secara Geografis Sumatera Barat terletak dipesisir bagian tengah pulau Sumatera yang terbentuk oleh dataran rendah dipantai dan dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh bukit barisan. Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, dengan gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Jambi sebagai gunuang tertinggi, yang mencapai ketinggian 3,085 m. Selain gunung kerinci sumatera barat juga memiliki gunung aktof lainnya seperti gunung Marapi, gunung, gunung Tandikat dan gunung Talang. Selain itu Sumatera juga memiliki Danau. Danau terluas adalah danau singkarak yang terletak dikabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Dan disusul danau Maninjau di Kabupaten Agam. Luas Danau Singkarak mencapai 130 km² menjadikan danau Singakarak menjadi danau terluas ke 11 di Indonesia. Dan di kabupaten Solok juga terdapat danau kembar yaitu danau diatas dan danau dibawah.

Sedangkan secara astronomis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara dan 30 30' Lintang Selatan dan antara 980 36' – 101053' Bujur Timur. Dan Provinsi Sumatera barat memiliki luas

wilayah 42,01 ribu km² dimana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia.

c. Keadan Iklim

Seperti daerah lainnya Provinsi Sumatera Barat memiliki iklim yang secara umum bersifat tropis dengan suhu udara antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Sumatera Barat juga dilalui oleh garis katulistiwa, tepatnya di kabupaten Pasaman yaitu di Bonjol. Di provinsi ini bermuara sungai besar kearah timur Sumatera seperti batang Hari, Siak dan Inderagiri dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir Barat adalah batang Anai, Batang Aru dan Batang Tarusan.

Sumatera Barat memiliki ketinggian daratan yang bervariasi antar Kabupaten dan Kota. Sebagian daerahnya berada pada daerah daratan tinggi kecuali daerah Painan, Simpang Ampek, Pariaman dan Tua Pejat.

Pada tahun 2020 rata-rata suhu udara di Provinsi Sumatera Barat berkisar 25,0 °C – 26,3 °C dengan rata-rata kelembapan udara antara 81,3% - 87,5%. Curah hujan terpantau selama tahun ini paling banyak terjadi pada bulan September yaitu 680,30 mm³.

d. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Sumatera barat pada umumnya juga seperti provinsi-provinsi lain dimana kepala pemerintahan dimulai dari

Gubernur sampai kepala kewilayahan dibawah desa. Sebutan desa di Provinsi Sumatera Barat disebut Nagari.

Secara administratif provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/ kota. Pembagian wilayah administratif dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 4.1

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah(km2)	Jumlah Penduduk	Kecamatan	Kelurahan
1	Kab. Kepulauan Mentawai	6.011,35	83.517	10	43
2	Kab. Pesisir Selatan	5.749,89	518.265	15	182
3	Kab. Solok	3.738	375.801	14	74
4	Kab. Sijunjung	3.130,40	233.444	8	61
5	Kab. Tanah Datar	1.336,10	366.136	14	75
6	Kab. Padang Pariaman	1.332,51	462.126	17	103
7	Kab. Agam	1.804,30	524.906	16	82
8	Kab. Lima Puluh Kota	3.571,14	374.067	13	79
9	Kab. Pasaman	3.947,63	315.470	12	37
10	Kab. Solok Selatan	3.346,20	177.462	7	39
11	Kab. Dharmasraya	2.961,13	205.127	11	52
12	Kab. Pasaman Barat	3.887,77	428.641	11	19
13	Kota Padang	693,66	883.767	11	104
14	Kota Solok	71,29	68.241	2	13
15	Kota Sawahlunto	231,91	64.299	4	27
16	Kota Padang Panjang	23	53.094	2	16
17	Kota Bukittinggi	25,24	115.986	3	24
18	Kota Payakumbuh	85,22	129.751	5	47
19	Kota Pariaman	66,13	88.984	4	55

e. Kependudukan

Penduduk Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 5,53 juta jiwa yang terdiri dari 2,79 juta laki-laki dan 2,75 juta perempuan. Hasil perbandingan dengan penduduk dengan tahun sebelumnya didapati pertambahan sebanyak 687,56 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kepada peduduk Sumatera Barat tahun 2020 adalah 132 orang per km².

Persentase penduduk usia Produktif (15-64 tahun) sebesar 67,98%. Sementara sisanya 32,02 % termasuk penduduk usia non produktif, yang terdiri dari 25,42% penduduk usia 0-14 tahun dan 6,59% penduduk 65 tahun keatas.

f. Sumber Daya Alam

Sumber daya Alam yang ada di Sumatera Barat adalah batu bara, besi, batu gatelina, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, timah hitam dan hasil perikanan. Dengan perairan pantai Barat kepulauan mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan banyak yang menangkap ikan seperti ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting dan mutiara.

Kemudian dengan adanya daerah pesisir yang ditanami pohon kelapa, daerah perbukitan yang menghasilkan karet, cengkeh dan lada. Kawasan Pegunungan yang menghasilkan banyak kayu. Sampai kepada bahan galian batu Kapur yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen oleh PT.

Semen Padang. Dan juga bahan galian seperti Batu Bara yang terdapat di Sawahlunto.

g. Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebanyak 6.360.411,94 juta rupiah. Yang mana penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan dengan jumlah 4.002552,88 juta rupiah, Kemudian diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah 2.251.335,22 juta rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan jumlah 106.523,84 juta rupiah.

h. Suku Bangsa

Mayoritas masyarakat Provinsi Sumatera Barat bersuku Minangkabau. Di daerah Pasaman selain suku minang juga terdapat suku Batak dan suku Madailing yang dipicu setelah terjadinya perang Paderi. Dan terdapat daerah transmigrasi setelah ditetapkan oleh presiden Soekarno pasca terjadinya politik pemerintahan PRRI, daerah sitiung.

Di kepulauan Mentawai mayoritas penduduknya ber etnis mentawai, jarang dijumpai bersuku Minangkabau. Sedangkan Etnis tionghoa hanya terdapat di kota-kota seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Payakumbuh. Dan di Padang dan Pariaman juga terdapat sedikit etnis Nias dan tamil dalam jumlah yang kecil.

i. Agama

Mayoritas masyarakat Provinsi Sumatera Barat beragama Islam. Dalam tahun 2020 persentase penduduk Provinsi Sumatera Barat 97,48% beragama Islam. Dan 2,52% yang beragama Protestan, Khatolik, Budha dan Hindu. Dari segi Qurban pada tahun 2020 hewan yang paling banyak dipakai adalah Sapi sebanyak 36.856 ekor sapi.

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat

Visi

“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera”

Misi

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais beradat dan berbudaya berdasarkan falsafa “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan professional
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
 - b. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah
 - c. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

B. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji variabel dependen dan independen berdistribusi dengan normal.

1) Persamaan I

Table 4.2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		174
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34636939
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.042
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.006 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Dari Tabel persamaan diatas dapat dilihat pada table *Unstandardized Residual* nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,06 > 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi normal.

2) Persamaan II

Table 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		174
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.44436171
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.035
	Negative	-.058
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari Tabel persamaan diatas dapat dilihat pada table *Unstdardized Residual* nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonearitas

1) Persamaan I

Table 4.4

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.046		
	PAD	1.179E-12	.508	1.970
	DAU	1.830E-13	.393	2.544

DAK	-5.124E-12	.383	2.612
-----	------------	------	-------

a. Dependent Variable: PE

Dari table diatas dapat diketahui bahwa

- a) VIF pada variabel PAD sebesar $1,970 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,508 > 0,10$
- b) VIF pada variabel DAU $2,544 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,393 > 0,10$
- c) VIF pada variabel DAK $2,612 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,383 > 0,10$

Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas

2) Persamaan II

Table 4.5

Model	Coefficients ^a		
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	PAD	.504	1.982
	DAU	.392	2.551
	DAK	.270	3.697
	PE	.547	1.828

a. Dependent Variable: IPM

Dari table diatas dapat diketahui bahwa

- a) VIF pada variabel PAD sebesar $1,982 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,504 > 0,10$

- b) VIF pada variabel DAU $2,551 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,392 > 0,10$
- c) VIF pada variabel DAK $3,697 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,270 > 0,10$
- d) VIF pada variabel PE $1,828 < 10$ dengan tolerance sebesar $0,547 > 0,10$

Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

1) Persamaan I

Table 4.6

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients	B	Beta	Coefficients		
1	(Constant)	.364	.059		6.217	.000
	PAD	-6.823E-13	.000	-.104	-.975	.331
	DAU	-1.793E-13	.000	-.132	-1.088	.278
	DAK	3.336E-13	.000	.107	.872	.384

a. Dependent Variable: abs_res1

Dari table diatas dapat diketahui bahwa

- a) Nilai Signifikan variabel PAD sebesar $0,331 > 0,05$
- b) Nilai Signifikan variabel DAU sebesar $0,278 > 0,05$
- c) Nilai Signifikan variabel DAK sebesar $0,384 > 0,05$

Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas

2) Persamaan II

Table 4.7

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.083	.787		6.462	.000
	PAD	-2.946E-12	.000	-.037	-.346	.730
	DAU	-2.729E-12	.000	-.163	-1.361	.175
	DAK	-1.247E-12	.000	-.033	-.268	.789
	PE	.205	.930	.017	.220	.826

a. Dependent Variable: abs_res2

Dari table diatas dapat diketahui bahwa

- a) Nilai Signifikan variabel PAD sebesar $0,730 > 0,05$
- b) Nilai Signifikan variabel DAU sebesar $0,175 > 0,05$
- c) Nilai Signifikan variabel DAK sebesar $0,789 > 0,05$
- d) Nilai Signifikan variabel PE sebesar $0,826 > 0,05$

Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui melihat apakah ada korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya dengan kriteria $Dw > dL$ dan $Dw > dU$ maka H_0 diterima dan sebaliknya $Dw < dL$ dan $Dw < dU$ maka H_0 ditolak.

1) Persamaan I

Table 4.8

Model Summary^b					
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.677 ^a	.458	.448	.39761	1.859

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: PE

Dari table diatas dapat diketahui bahwa nilai Dw sebesar 1,859
 $> 1,771$ dan $1,782$ dan $1,859 < 2,2829$ 4-dL $< 2,128$ 4-dU maka Ho
diterima sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

2) Persamaan II

Table 4.9

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.626 ^a	.392	.372	.05438	2.050

a. Predictors: (Constant), LnX3@1, LnX2@1, LnX1@1

b. Dependent Variable: LnZ@1

Dari table diatas dapat diketahui bahwa nilai Dw sebesar 2,050
 $> 1,771$ dan $1,782$ dan $1,859 < 2,2829$ 4-dL $< 2,128$ 4-dU maka Ho
diterima sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

2. Hasil Uji Jalur (Path Analysis)

a. Uji Jalur Persamaan I

Table 4.10

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.677 ^a	.458	.448	.397606	

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Table 4.11

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.931	.103	57.574	.000
	PAD	1.021E-12	.000	.119	1.690
	DAU	5.628E-13	.000	.187	1.889
	DAK	-5.861E-12	.000	-.868	-9.110

a. Dependent Variable: PE

Dari tabel koefisien jalur model I dapat dipahami bahwa :

Mengacu pada output regresi model I pada bagian koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari dua variabel yaitu $X_1 = 0,093$ dan $X_2 = 0,061$ lebih besar dari $0,05$ dan $X_3 = 0,000$ lebih kecil dari $0,05$. dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa X_1 dan X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z sedangkan X_3 berpengaruh signifikan terhadap Z .

Besarnya R square pada table model summary adalah sebesar 0,458. Hal ini menunjukan bahwa sumbangan penagruh X3 adalah sebesar 45,8% sementara sisanya 54,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak terdapat pada penelitian ini. sementara itu untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus

$$e1 = \sqrt{1-0,458} = 0,736$$

b. Uji Jalur Persamaan II

Table 4.12

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.554 ^a	.307	.290	4.775871	

a. Predictors: (Constant), PE, PAD, DAU, DAK

Table 4.13

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46.034	5.602	8.218	.000
	PAD	4.260E-11	.000	.467	5.820
	DAU	-1.884E-11	.000	-.591	-5.210
	DAK	3.682E-11	.000	.515	3.906
	PE	4.611	.921	.435	5.005

a. Dependent Variable: IPM

Dari tabel koefisien jalur model II dapat dipahami bahwa :

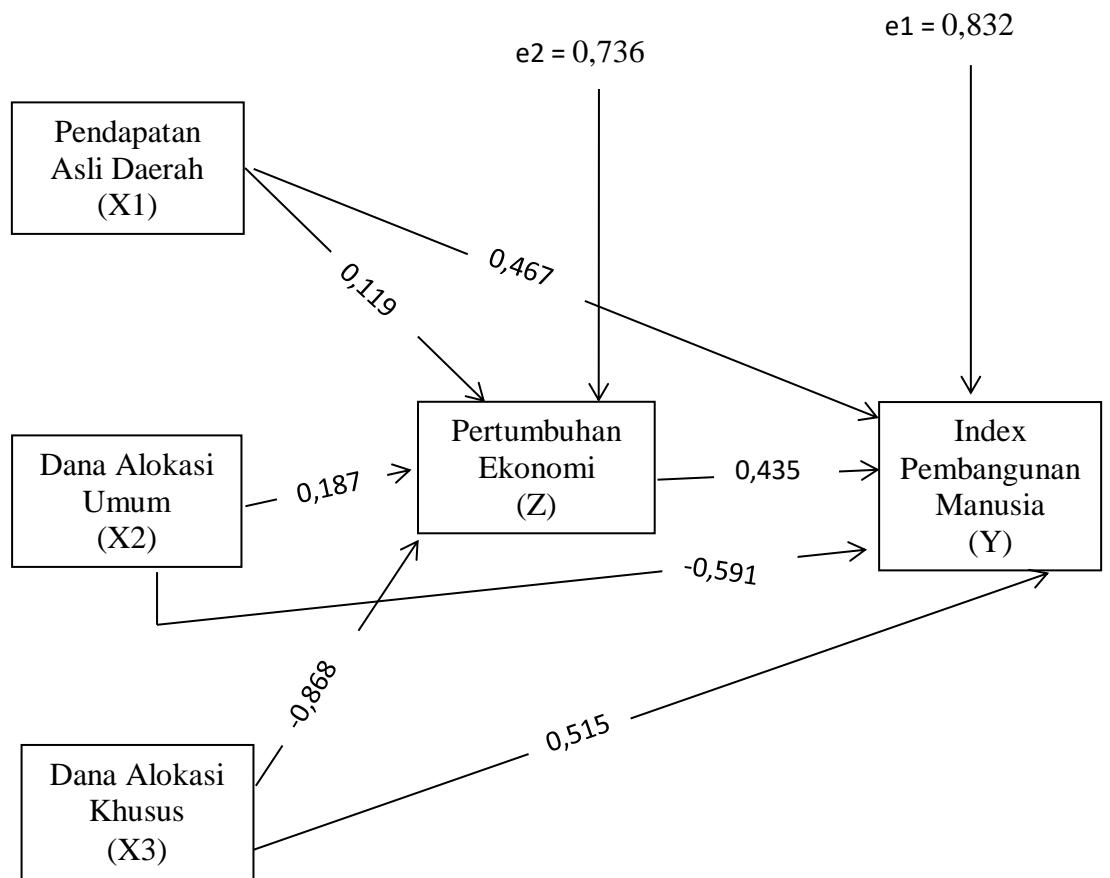
Mengacu pada output regresi model II pada bagian coefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari semua variabel yaitu X1, X2, X3 dan Z = 0,000 lebih kecil dari 0,05 dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa X1, X2, X3 dan Z berpengaruh signifikan terhadap Y

Besarnya R square pada table model summary adalah sebesar 0,307. Hal ini menunjukan bahwa sumbangan pengaruh X1, X2, X3 dan Z adalah sebesar 30,7% sementara sisanya 69,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak terdapat pada penelitian ini. sementara itu untuk nilai e2 dapat dicari dengan rumus

$$e2 = \sqrt{1-0,307} = 0,832$$

Dari hasil Uji Jalur kedua persamaan diatas dapat diketahui kerangka Uji Jalur sebagai berikut:

Gambar 4.1



Dari hasil Uji jalur dan kerangka diatas dapat ditarik kesimpulan :

1) Analisis pengaruh X1 terhadap Z

diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar $0,093 > 0,05$

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z

2) Analisis pengaruh X2 terhadap Z

diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar $0,061 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z

3) Analisis pengaruh X3 terhadap Z

diperoleh nilai signifikansi X3 sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Z

4) Analisis pengaruh X1 terhadap Y

diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar $0,000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Y

5) Analisis pengaruh X2 terhadap Y

diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y

6) Analisis pengaruh X3 terhadap Y

diperoleh nilai signifikansi X3 sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Y

7) Analisis pengaruh Z terhadap Y

diperoleh nilai signifikansi Y sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Z terhadap Y

8) Analisis pengaruh X1 melalui Z terhadap Y

Penagaruh langsung dari nilai koefisien yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,467. Sedangkan pengaruh total secara tidak langsung yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh X1 terhadap Z ditambah dengan pengaruh Z terhadap Y yaitu : $0,119 + 0,435 = 0,554$.

9) Analisis pengaruh X2 melalui Z terhadap Y

Pengaruh langsung dari nilai koefisien yang diberikan X2 terhadap Y sebesar -0,591. Sedangkan pengaruh total secara tidak langsung yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh X2 terhadap Z ditambah dengan pengaruh Z terhadap Y yaitu : $0,187 + 0,435 = 0,622$

10) Analisis pengaruh X3 melalui Z terhadap Y

Pengaruh Langsung dari nilai Koefisien yang diberikan X3 terhadap Y sebesar 0,515. Sedangkan pengaruh total secara tidak langsung yang diberikan X3 terhadap Y adalah pengaruh X3 terhadap Z ditambah dengan pengaruh Z terhadap Y yaitu : $-0,868 + 0,435 = -0,433$.

3. Hasil Uji Intervening (Sobel test)

a. Persamaan I

Table 4.14

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Coefficients Beta	t	Standardize d Coefficients
	B	Std. Error			
1 (Constant)	73.379	1.322		55.510	.000
PAD	4.731E-11	.000	.519	6.100	.000
DAU	-1.624E-11	.000	-.510	-4.249	.000
DAK	9.796E-12	.000	.137	1.187	.237

a. Dependent Variable: IPM

Dari hasil pengujian persamaan I diatas menunjukkan bahwa :

- 1) Nilai koefisien Pendapatan Asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 4,731 dengan standar error 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga Pendapatan Asli daerah signifikan berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- 2) Nilai koefisien Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -1,624 dengan standar error 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga Dana Alokasi Umum signifikan berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3) Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 9,796 dengan standar error 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,237, sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

b. Persamaan II

Table 4.15

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Beta	t	Sig.
	Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	46.034	5.602		8.218	.000
PAD	4.260E-11	.000	.467	5.820	.000
DAU	-1.884E-11	.000	-.591	-5.210	.000
DAK	3.682E-11	.000	.515	3.906	.000
PE	4.611	.921	.435	5.005	.000

a. Dependent Variable: IPM

Dari hasil pengujian persamaan II diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 4,611 dengan standar error 0,921 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga Pertumbuhan Ekonomi signifikan berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dasar Pengambilan keputusan Uji sobel test adalah :

- Jika nilai $z < 1,96$ maka dinyakatakan tidak mampu memediasi hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- Jika nilai $z > 1,96$ maka dinyakatakan mampu memediasi hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Berdasarkan hasil pengujian Sobel tes melalui Spss 25 diatas nilai z dapat dihitung sebagai berikut:

$$a) zX_1 = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SEa^2) + (a^2 SEb^2)}}$$

$$zX_1 = \frac{4,731 \times 4,611}{\sqrt{(4,611^2 \times 0,000^2) + (4,731^2 \times 0,921^2)}}$$

$$zX_1 = \frac{21,81464}{\sqrt{18,9856363}}$$

$$zX_1 = \frac{21,81464}{4,357251}$$

$$zX_1 = 5,006 > 1,96$$

$$b) zX_2 = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SEa^2) + (a^2 SEb^2)}}$$

$$zX_2 = \frac{-1,624 \times 4,611}{\sqrt{(4,611^2 \times 0,000^2) + (-1,624^2 \times 0,921^2)}}$$

$$zX_2 = \frac{-7,488264}{\sqrt{-2,23713046}}$$

$$zX_2 = \frac{-7,488264}{-1,495704}$$

$$zX_2 = 5,006 > 1,96$$

$$c) zX_3 = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SEa^2) + (a^2 SEb^2)}}$$

$$zX_3 = \frac{9,796 \times 4,611}{\sqrt{(4,611^2 \times 0,000^2) + (9,796^2 \times 0,921^2)}}$$

$$zX_3 = \frac{9,022116}{\sqrt{81,3985771}}$$

$$zX_3 = \frac{9,022116}{9,022116}$$

$$zX_3 = 1 < 1,96$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai z dari variabel Pendapatan Asli daerah sebesar $5,006 > 1,96$ artinya pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan begitu juga nilai z dari variabel Dana Alokasi Umum sebesar $5,006 > 1,96$ artinya pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan begitu. Namun pada nilai z dari variabel Dana Alokasi Khusus sebesar $1 < 1,96$ artinya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2010 sampai tahun 2019 yang diolah menggunakan spss 25. Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan tidak berpengaruh positif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien X1 (PAD) sebesar 1,021E-12 artinya jika terjadi kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 1,021E-12.

Nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,093 artinya Pendapatan Asli Daerah secara langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikan $> 0,05$. Sehingga hasil regresi itu tidak sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Carunia Mulya dimana Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang bergantung kepada sarana prasarana yang baik. Kemudian tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Barat ini salah satunya disebabkan juga dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010 sampai 2019 artinya

pertumbuhan perdaerah di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga Pendapatan Asli Daerah belum cukup mampu memacu perutumbuhan Ekonomi daerah sendiri.

Dengan Demikian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teja Rinanda dan Subambang dimana Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan tidak berpengaruh positif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien X2 (DAU) sebesar 5,628E-13 artinya jika terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1 satuan maka akan menaikan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5,628E-13.

Nilai signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0.061 artinya Dana Alokasi Umum secara langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikan $> 0,05$. Sehingga hasil regresi itu tidak sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tidak berpengaruhnya Dana Alokasi Umum ini tidak sesuai dengan penjelasan Abas, dimana Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja

langsung pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan. Hasil Dana Alokasi Umum yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan dengan belum mampunya pemerintah dalam mengalokasikan dana alokasi umum yang digunakan untuk mengimbangi pendapatan daerah yang berbeda-beda. Dan juga disebabkan adanya peningkatan Dana Alokasi Umum periode 2010 sampai 2019 diiringi juga dengan peningkatan pertumbuhan penduduk provinsi Sumatera Barat sehingga Dana Alokasi Umum belum mampu mempercepat pertumbuhan Ekonomi.

Dengan Demikian berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Teja Rinanda dan Subambang dan penelitian Lio Satria Putra Perkasa, George M.V Kawung dan Steeva Y.L Tuamangkeng dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien X3 (DAK) sebesar -5,861E-12 artinya jika terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar 1 satuan maka akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar -5,861E-12.

Nilai signifikan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,000 artinya Dana Alokasi Khusus secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikan $< 0,05$. Sehingga hasil regresi itu

sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/ 2006 yang menjelaskan bahwa pembangunan daerah yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

Demikian juga hal ini tidak sesuai dengan penelitian Teja Rinanda dan Subambang dimana Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Dan juga tidak sejalan dengan penelitian Lio satria Putra Perkasa, George M.V Kawung dan Steeva Y.L Tuamangkeng yang didapati Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien X1 (PAD) sebesar 4,260E-11 artinya jika terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 4,260E-11.

Nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.000 artinya Pendapatan Asli Daerah secara langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena nilai signifikan $< 0,05$. Sehingga hasil

regresi itu sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Demikian sesuai dengan Carol J.Cielfe Colfer yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik dalam kesehatan ataupun dalam pendidikan masyarakat. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teja Rinanda dan Subambang dan penelitian Hesty Handayani dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

5. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien X2 (DAU) sebesar -1.884E-11 artinya jika terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar -1.884E-11.

Nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.000 artinya Dana Alokasi Umum secara langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena nilai signifikan $< 0,005$. Sehingga hasil regresi itu sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan

Manusia periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Demikian hal ini tidak bertentangan dengan penjelasan Carol J.Cielfe Colfer yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dapat meningkatkan belanja langsung masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudrika Alamsyah Hasan dan M fajar Suryo Agung dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

6. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien X3 (DAK) sebesar 3.682E-11 artinya jika terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3.682E-1

Nilai signifikan Dana Alokasi Khusus sebesar 0.000 artinya Dana Alokasi Khusus secara langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena nilai signifikan $< 0,005$. Sehingga hasil regresi itu sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Demikian sesuai dengan pernyataan Carol J.Cielfe Colfer di mana Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teja Rinanda dan Subambang dimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

7. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji jalur diatas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Diketahui nilai koefisien Z (PE) sebesar 4.611 artinya jika terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 4.611.

Nilai signifikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.000 artinya Pertumbuhan Ekonomi secara langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena nilai signifikan $< 0,005$. Sehingga hasil regresi itu sesuai dengan hipotesis dengan penelitian ini yang menduga adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode 2010 sampai 2019 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Demikian sesuai dengan penjelasan Yusniah Anggraini yang menyatakan salah satu indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia adalah adanya Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Hariza dimana

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

8. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening

Berdasarkan uji jalur diatas Pengaruh langsung dari nilai koefisien yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,467. Sedangkan secara tidak langsung pengaruh total yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditambah dengan pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu : $0,119 + 0,435 = 0,554$. Hal ini menunjukkan sebesar 55,4% bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini diperkuat dengan perhitungan nilai sobel tes dapat diketahui nilai z dari pertumbuhan ekonomi sebagai variebel mediasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,006 dimana $> 1,96$ artinya pertumbuhan ekonomi mampu memediasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sehingga pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maka dugaan hipotesis dalam penelitian ini

terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan Hasil ini maka sesuai dengan penjelasan Carol J.Cielfe Colfer yang menyatakan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi.

9. Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengaruh langsung dari nilai koefisien yang diberikan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar - 0,591 Sedangkan pengaruh total yang diberikan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditambah dengan pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu : $0,187 + 0,435 = 0,622$. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 62,2% Dana Alokasi Umum dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini diperkuat dengan perhitungan nilai sobel tes dapat diketahui nilai z dari pertumbuhan ekonomi sebagai variebel mediasi Dana Alokasi sebesar 5,006 dimana $> 1,96$ artinya pertumbuhan ekonomi mampu memediasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sehingga pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pada Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dugaan hipotesis dalam penelitian ini terbukti bahwa Dana Alokasi Umum melalui Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Dengan demikian hasil ini sesuai dengan teori Carol J.Cielfe Colfer yang menyatakan secara tidak langsung Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

10. Analisis pengaruh Dana Alokasi Khusus melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengaruh langsung yang diberikan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,515 Sedangkan pengaruh total yang diberikan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditambah dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu : $-0,868 + 0,435 = -0,433$. Hal ini menunjukkan sebesar 43,3% bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini diperkuat dengan perhitungan nilai sobel tes dapat diketahui nilai z dari pertumbuhan ekonomi sebagai variebel mediasi Dana Alokasi Khsusu sebesar 1 dimana $< 1,96$ artinya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu

memediasi pada Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maka dugaan hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa Dana Alokasi Khusus melalui Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Dengan demikian tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Abas bahwa Dana Alokasi Khusus dapat memacu Pertumbuhan Ekonomi sehingga dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini juga disebabkan dengan kurang mampunya pemerintah dalam memaksimalkan anggaran Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya Dana Alokasi Khusus yang diterima tergantung kemampuan Pemerintah Daerah. Dan juga dipengaruhi laju pertumbuhan Ekonomi Nasional yang yang cenderung menurun pada periode 2010-2019.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari Penelitian bab iv diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,093 > 0,05$
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,061 > 0,05$
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$
5. Pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Dana Alokasi Umum sebesar $0,000 < 0,05$
6. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$

7. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$
8. Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan nilai z hitung dari Pertumbuhan Ekonomi sebesar $5,006 > z$ tabel 1,96
9. Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan nilai z hitung dari Pertumbuhan Ekonomi sebesar $5,006 > z$ tabel 1,96
10. Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi terbukti tidak berpengaruh. Hal ini dibuktikan nilai pengaruh z hitung dari Pertumbuhan Ekonomi sebesar $1 < z$ tabel 1,96

B. Saran

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia disarankan kepada pemerintah daerah mengendalikan potensi daerah dan memaksimalkan Dana Alokasi Umum dan Khusus serta memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah supaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang baik di daerah

Sumatera Barat karena semua variabel tersebut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan Ekonomi secara tidak langsung juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia disarankan kepada pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengalokasikan Dana Alokasi Umum dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia di daerah kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. 2018. *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: CV Lontar Mediatama.
- Anggraini Yusniah. 2018. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.
- Amir dan Andi Hamsiah. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Prum Bukit Golp Arkadia.
- Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogayakarta: Graha Ilmu.
- Basuki, Agus Tri. 2014. *Penggunaan SPSS dalam Statistik*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Basuki, Agus Tri. 2016. *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta. Danisa Media.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Colfer , Carol J.Cielfe dkk. 2009, *Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan Mencari Tata Kelola Yang Baik Dan Berkeadilan Di Asia Pasifik*. Jakarta: Center For International Riset.
- Duli, Nikolaus. 2019. *Metodologi Penelitian Kaunitatif Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakrta: CV Budi Utama.
- Dwi Priyatno. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamid, Edi Sukamdi. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum*. Yogyakarta: Uii pers.
- Handra, Hefrizal dan Bambang Juanda. 2017. *Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Kompak
- Machali, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

- Mawardi Imran. 2020. *Keuangan Publik Syaria'h Teori dan Praktik*. Surabaya.CV Nararya.
- M.Thoha B. Sampurna Jaya dan Alben Ambarita. 2016. Statistik terapan dalam pendidikan. Yogyakarta: Media Akademi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07/ 2006 Tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan.
- Pratiwi, Maria Cristina Yuli dan Mudrajad Kuncoro. 2017. *Membangun Kalimantan Potensi Ekonomi Daerah, Pusat Pertumbuhan dan Strategi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra Windhu. 2018. *Perekonomian Indonesia*. Depok:Rajawali Pers.
- Rahajeng, Anggi. 2016. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakrata: Gajah Mada University Press.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian dibidang Manajemen, Pendidikan, dan Eksperimen. Yogyakarta: CV Budi Tama
- Sarwono, Jonathan 2012. Path Analisis Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis, Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS. Jakarta:PT Elex Mria Komputindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakrta: Pustakabarupress.
- Suwanda, Dadang dkk. 2019. *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wija Andrias Pong dkk. 2019. Employee Engagement Pengaruh Gaya Kepemimpian, Budaya Kerja, Dan Kepuasan Kerja, Klaten: Lakeisha
- Zulganef. 2018. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*.Yogyakarta: Tajuk Entri Utama.